

EFEKTIVITAS PELAYANAN PENANGANAN KEBAKARAN BERDASARKAN PEMBAGIAN MANAJEMEN WILAYAH DI KABUPATEN BANDUNG BARAT

Dewi Agustina Nurdianti

NPP.29.0640

*Asdaf Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat
Program Studi Manajemen Keamanan Dan Keselamatan Publik*

Email: deagustinanurdianti@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): *Disaster is an event or sequence of events that threatens and disrupts the life and life cycle of the community, both in the economic and social sectors. Many losses will arise if a disaster is not handled quickly and appropriately. Examples of losses that will arise are the loss of life, loss of property, environmental damage, and the negative impact on the psychology of the community. Purpose:* of this research was to find out and analyze the form, results, and how important it is to distribute good and effective regional postal management. **Methods:** *The technique used in this study uses qualitative analysis techniques with an inductive approach to obtain data in accordance with the conditions in the field objectively. In collecting data using several ways, namely: observation, interviews, and documentation. Results:* of observations and interviews conducted on the effectiveness of fire handling services based on the division of regional management in West Bandung Regency, success is influenced by various supporting factors, both personal protective equipment, transportation and firefighting apparatus that are available and have sufficient competence. **Conclusion:** *The fire department is tasked with carrying out maximum fire handling services as a form of community protection which is a mandatory duty of the government. The success of this fire management is the main goal so that people feel safe and can live a life free from the threat of fire hazards.*

Keywords: *Fire, Management, Service.*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Bencana merupakan suatu kejadian atau runtutan kejadian yang mengancam dan bersifat mengganggu hidup dan siklus kehidupan masyarakat, baik itu pada sektor ekonomi maupun sosial. Banyak kerugian yang akan timbul jika suatu bencana tidak tertangani dengan cepat dan tepat. Contoh kerugian yang akan timbul adalah adanya korban jiwa, kerugian harta benda, kerusakan lingkungan, dan dampak buruk terhadap psikologis masyarakat. **Tujuan:** penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis bentuk, hasil, dan seberapa pentingnya pembagian manajemen pos wilayah yang baik dan efektif. **Metode:** Teknik yang digunakan dalam penelitian tersebut menggunakan teknik analisis kualitatif dengan pendekatan induktif untuk memperoleh data sesuai dengan keadaan yang ada di lapangan secara obyektif. Dalam mengumpulkan data- data menggunakan beberapa cara yaitu: observasi,

wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan **Hasil/Temuan:** observasi dan wawancara yang dilakukan tentang efektivitas pelayanan penanganan kebakaran berdasarkan pembagian manajemen wilayah di Kabupaten Bandung Barat, keberhasilan dipengaruhi oleh berbagai faktor pendukung baik itu alat pelindung diri, transportasi maupun aparatur pemadam yang tersedia dan memiliki kompetensi yang cukup Pemerintah Kabupaten Bandung Barat khususnya Dinas Pemadam Kebakaran bertugas melaksanakan pelayanan penanganan kebakaran yang maksimal sebagai bentuk perlindungan masyarakat yang menjadi tugas wajib dari pemerintah. **Kesimpulan:** Keberhasilan penanganan kebakaran ini merupakan tujuan utama agar masyarakat merasa aman dan dapat menjalani kehidupan yang bebas dari ancaman bahaya kebakaran. Kolaborasi yang baik dari pemerintah setempat dengan komunitas pemudanya. Guna meningkatkan partisipasi pemuda dalam program lorong literasi, disarankan untuk mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan media sosial serta berkolaborasi dengan berbagai pihak termasuk wirausahawan.

Kata kunci: Kebakaran, Manajemen, Pelayanan.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan letak geografisnya Kabupaten Bandung Barat bisa dikategorikan sebagai kawasan yang rawan akan terjadinya bencana. Susunan tanahnya terdiri dari gabungan bukit – bukit yang tentu sangat berpotensi menimbulkan berbagai macam bencana. Jika dilihat dari penggunaan lahannya pun mayoritas utama dipergunakan untuk lahan pertanian khususnya persawahan serta perkebunan. Dan urutan kedua digunakan oleh budidaya non pertanian (bangunan perumahan, industri skala besar maupun kecil, penggunaan tanah untuk jasa, seperti jasa transportasi, jasa perdagangan dan jasa pendidikan), fasilitas untuk keagamaan, kesehatan, hiburan, bangunan pemerintahan dan jasa keamanan ketertiban. Dilihat dari penggunaan lahannya Kabupaten Bandung Barat memiliki beberapa bencana yang harus kita waspadai yaitu bencana banjir dan bencana tanah longsor pada saat musim hujan, serta bencana kebakaran dan bencana kekeringan pada saat musim kemarau. Kebakaran adalah keadaan dimana sebuah bangunan (rumah atau pemukiman, gedung, lahan pertanian, hutan, pabrik dan berbagai fasilitas publik) dilanda api yang mengakibatkan berbagai kerusakan dan menimbulkan kerugian korban jiwa, harta benda dan merusak lingkungan serta mengakibatkan terganggunya siklus kehidupan dan kesehatan masyarakat. Bencana kebakaran merupakan salah satu bencana yang sering terjadi baik itu di Indonesia, Jawa Barat ataupun khususnya di Kabupaten Bandung Barat. Bencana kebakaran menduduki peringkat ke- 7 dari 10 macam bencana yang sering terjadi di Jawa Barat. Bencana kebakaran di Kabupaten Bandung Barat merupakan bencana yang menjadi persoalan serius, karena wilayah Kabupaten Bandung Barat memiliki lahan pertanian maupun hutan dan gedung industri yang lumayan banyak, seperti industri tekstil, makanan maupun obat. Selain itu, bencana kebakaran ini juga berbeda dengan bencana – bencana lainnya karena dalam proses kejadiannya tidak akan bisa di duga dan di prediksi sebelumnya. Kapan, dimana, apa penyebabnya, seberapa besar tingkat risikonya ataupun dampak yang akan terjadi setelahnya merupakan hal – hal yang tidak bisa di prediksi oleh kemampuan manusia.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018 – 2019

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target KK	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-		Realisasi Capaian Tahun Ke-		Rasio Capaian pada Tahun Ke-	
					2018	2019	2018	2019	2018	2019
1	Tingkat Waktu Tanggap (<i>Response Time Rate</i>) Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran	%	100	100	60	65	67	70	70	70

Sumber : Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bandung Barat

Berdasarkan Tabel diatas menampilkan bahwa Dinas Pemadam Kebakaran untuk Indikator Tingkat Waktu Tanggap (*Respon Time Rate*) telah mencapai 65% dari target 75%. Hal ini ditunjukkan dengan capaian program dan kegiatan yang dijalankan hasilnya optimal disertai dengan kemajuan atas pembangunan sarana dan prasarana Dinas Pemadam Kebakaran. Pada tahun 2018 target yang dicapai Renstra adalah 60% dengan capaian 65%, dengan rasio capaian mengalami peningkatan di tahun 2019 sebesar 70%. Kesimpulannya Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bandung Barat pada saat ini mengalami peningkatan kinerja dan tingkat waktu tanggap atas usaha pelayanannya dari tahun ke tahun meskipun belum memenuhi target yang telah di tentukan sebelumnya. Salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja pelayanan pemadam kebakaran Kabupaten Bandung Barat selain kekurangan personil, sarana prasarana dan faktor lainnya. Terutama yang menjadi perhatian adalah luasnya cakupan wilayah di Kabupaten Bandung Barat. Oleh karena itu, agar pelayanannya bisa tersampaikan pada seluruh wilayah, pemerintah membuat sebuah pos pemadam dengan cara membagi – bagi wilayah perkotaan atau daerah dengan di dasarkan pada karakteristik besarnya kebutuhan pasokan air untuk memadamkan sebuah api yang disebut wilayah manajemen kebakaran (WMK). Wilayah manajemen kebakaran ini juga bertujuan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dengan cara mendistribusikan pusat layanan agar bisa tersebar dengan lebih merata dan dalam cakupan wilayah yang paling terdekat. Pada realitanya meskipun pos pemadam sudah di dekatkan pelayanannya masyarakat pun harus ikut serta dalam proses pencegahan maupun penanganan bencana kebakaran yang terjadi. Hal ini di sebabkan oleh banyak faktor salah satunya, faktor luasnya wilayah cakupan dan jumlah pos pemadam yang tersebar di Kabupaten Bandung Barat.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks pelayanan,

pencegahan dan penanganan kebakaran. Penelitian Mira Veranita dan Dedeng Yusuf Maolani berjudul Analisis Kualitas Pelayanan Publik Pada Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Kota Bandung (Mira Veranita & Dedeng Yusuf Maolani, 2018), menemukan bahwa Kualitas pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Pencegahan dan penanggulangan Kebakaran Kota Bandung jika di hitung dan di ukur melalui empat (4) bagian yaitu aspek kecepatan, aspek kemudahan, aspek keamanan dan aspek ketepatan ternilai belum berjalan secara optimal dan efektif. Ini dapat terlihat dari masih banyaknya jumlah hal – hal yang tidak tertangani dengan baik dan terselamatkan dari kebakaran yang terjadi, baik itu kerugian korban jiwa maupun harta benda. Hal tersebut di akibatkan oleh :

- Jumlah unit armada yang kurang dan tidak memenuhi standar.
- Program pelatihan dan bimbingan mengenai pencegahan dan penanganan kebakaran secara mandiri kepada masyarakat yang masih kurang.
- Tenaga dari Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Kota Bandung yang kurang sigap dalam upaya pengecekan alat – alat pemadam yang akan di pakai atau pun yang telah terpasang di sekitar area kebakaran.

Masih kurangnya pihak tenaga ahli yang berusia muda dan mahir dalam upaya penanganan kebakaran di Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kota Bandung.. Penelitian Rika Trisna yang berjudul Kajian Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran di Kota Palembang (Rika Trisna 2003) menemukan bahwa Penyelenggaraan dan pelaksanaan pemerintahan pengaturan, pemanfaatan sumber daya dan pembagian di kota Palembang cenderung mengutamakan kegiatan yang dirasa dapat menghasilkan dampak secara langsung terhadap peningkatan peningkatan asli daerah (PAD), akibatnya terjadi ketidakseimbangan dalam pelayanan yang tidak berhubungan secara langsung, dan banyak hal yang terabaikan termasuk upaya dalam hal pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran. Pelayanan bahaya kebakaran yang dilakukan belum sepenuhnya memenuhi tuntutan kebutuhan yang ada. Upaya yang dilakukan baru mencapai 47% dari total yang harus di penuhi agar menghindari potensi bencana bahaya kebakaran yang ada di Kota Palembang. Hal ini diakibatkan oleh sarana dan prasarana yang kurang memadai, jumlah pos pemadam dan personil yang masih belum memenuhi standar pelayanan minimum. Dan juga diperparah oleh banyaknya permintaan pelayanan penanggulangan penanganan bahaya kebakaran yang sangat tinggi pada sektor publik, perdagangan, bangunan, pemukiman penduduk, dan fasilitas publik.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni pelayanan penanganan kebakaran berdasarkan pembagian manajemen wilayah atau wilayah manajemen kebakaran berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Dasar pelayanan Minimal sub Urusan Kebakaran Daerah Provinsi Kabupaten/Kota, metodenya yang digunakan menggunakan metode efektivitas Duncan berbeda dengan penelitian Mira Veranita, Dedeng Yusuf Maolani dan Rika Trisna. Selain itu pengukuran/indikator yang digunakan juga berbeda dari penelitian sebelumnya yakni menggunakan pendapat dari Duncan dalam Steers dalam Zulkarnain (2012:32) yang menyatakan bahwa efektivitas bisa diukur oleh 3 indikator, yaitu pencapaian tujuan, integrasi dan adaptasi.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan memperoleh gambaran yang jelas mengenai bagaimana tingkat efektivitas pelayanan penanganan kebakaran berdasarkan pembagian

manajemen wilayah di Kabupaten Bandung Barat dan apa saja yang menjadi permasalahan utama sehingga dapat mempengaruhi pelayanan penanganan kebakaran yang dihadapi Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bandung Barat.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan analisis data secara induktif. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap lima orang informan yang terdiri dari: Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bandung Barat, Kepala Bidang Pemadaman dan Penyelamatan, Fungsional inspeksi proteksi kebakaran, Fungsional pemadaman, dan orang masyarakat. Analisis data menggunakan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dalam analisa data peneliti juga menggunakan Teori Efektivitas Duncan meliputi ; pencapaian tujuan, integrasi dan adaptasi di ambil dalam jurnal berjudul Pengaruh Kinerja Pegawai Terhadap Efektivitas Organisasi di Kantor Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang (2012). Penulis mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kuantitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 5 orang informan yang terdiri dari Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bandung Barat, Kepala bidang pemadaman dan penyelamatan, Fungsional inspeksi proteksi kebakaran, Fungsional pemadaman dan masyarakat. Adapun analisisnya menggunakan teori partisipasi yang digagas oleh Duncan dalam Steers dalam Zulkarnain (2012:32) yang menyatakan bahwa efektivitas bisa diukur oleh 3 indikator, yaitu pencapaian tujuan, integrasi dan adaptasi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, peneliti menemukan hal-hal terkait dengan efektivitas pelayanan penanganan kebakaran berdasarkan pembagian manajemen wilayah yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Dengan mengacu pada teori efektivitas Duncan, peneliti menggunakan dimensi pencapaian tujuan, integrasi dan adaptasi dalam menganalisis efektivitas pelayanan penanganan kebakaran berdasarkan pembagian manajemen wilayah di Kabupaten Bandung Barat. Dengan adanya dimensi tersebut, diharapkan penulis dapat menjawab rumusan masalah yang telah ditentukan, yaitu Bagaimana efektivitas pelayanan penanganan kebakaran di Kabupaten Bandung Barat berdasarkan pembagian wilayah manajemen kebakaran (WMK) dan pos pemadam yang sudah ada, yang hasilnya adalah sebagai berikut :

3.1. Pencapaian Tujuan

Pencapaian tujuan adalah keseluruhan usaha yang dilakukan dalam mencapai tujuan yang dinilai dengan suatu proses. Sehingga, dengan mencapai tujuan akhir yang ditetapkan terjamin, maka dibutuhkan suatu proses baik itu terhadap proses dalam mencapai bagian – bagian maupun proses dalam arti periodesasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor, yaitu : (1) kurun waktu pencapaiannya (2) sasaran merupakan target kongkrit (3) dasar hukum. Dalam proses pencapaian tujuan pada Dinas Pemadam Kebakaran di Kabupaten Bandung Barat adalah dengan mengukur keberhasilan dalam menangani suatu kejadian kebakaran dan dapat meminimalisir dampak buruk yang terjadi setelah bencana. Resiko kebakaran dapat diakibatkan oleh kelalaian manusia, peralatan ataupun alarm yang tidak berfungsi dengan baik. Maka dari itu kita memerlukan sistem manajemen kebakaran yang baik sehingga dapat mengatur dan berjalan demi mencapai tujuan dan sasaran secara aman, efisien dan efektif, tujuan tersebut merupakan tujuan yang paling

mendasar. Sistem manajemen penanggulangan kebakaran merupakan bagian dari sistem kebakaran, yang didalamnya memuat struktur organisasi, perencanaan, prosedur, pelaksanaan, proses tanggungjawab, pengkajian serta pemeliharaan. Kejadian kebakaran merupakan bencana yang tidak bisa dikendalikan sebelumnya, kapan, dimana serta apa saja yang menjadi dampak kedepannya maka dari itu diperlukan upaya dan usaha yang besar dan komprehensif dalam rangka mencegah dan menanggulangi kejadian kebakaran. Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bandung Barat dalam hal pencapaian tujuan ini yaitu memuat proses berjalannya penanggulangan kebakaran masih dirasa kurang karena belum tercapainya SPM yang ditetapkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pad Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota, namun hal ini terhambat dikarenakan banyaknya kekurangan yang ada yaitu diantaranya kurangnya pos pemadam, kurangnya aparatur pemadam, dan sarana prasarana yang digunakan.

3.2. Integrasi

Integrasi merupakan suatu ukuran yang berpatokan pada tingkat kemampuan yang di miliki oleh suatu organisasi agar dapat melaksanakan sosialisasi, mengembangkan kosensus, dan komunikasi dengan berbagai organisasi lain. Integrasi terdiri dari beberapa faktor, yaitu : (1) prosedur (2) proses sosialisasi. Peraturan yang digunakan pada saat menjalankan prosedur penanganan kebakaran adalah Peraturan kepala Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2021 Tentang Prosedur Tetap Operasi Penanggulangan Bencana Kebakaran Di Wilayah Kabupaten Banddung Barat yang memuat diantaranya :

- A. Tahapan Pemberangkatan Awal
 1. Menerima laporan berita kebakaran yang terdiri dari :
 - Nama dan nomor telepon yang dapat dihubungi
 - Alamat lokasi yang mengalami kebakaran
 - Apa saja yang terbakar
 - Jam terjadinya kejadian kebakaran
 - Titik drop / titik kenal
 2. Persiapan sebelum berangkat dan persiapan keberangkatan
 - 1 regu pasukan
 - 1 unit mobil pompa
 - 1 regu cadangan
 - 1 unit mobil komando / *incident commander*
 3. Mobilitasi menuju lokasi kejadian / TKP
 - Perjalanan menuju lokasi kebakaran
 - Tiba di lokasi kebakaran
 4. Size-Up intensitas kebakaran di TKP
 - Penilaian kondisi
 5. Strategi dan penyiapan operasi penyelamatan pemadaman
 - Operasi pemadaman
 - Operasi pemadaman
- B. Proses penyelamatan pertolongan / perawatan korban (*rescue*)
 1. Membangun pos pertolongan (poslong) dan tempat evakuasi

2. Operasi penyelamatan
- C. Proses lokalisasi api dan pemadam kebakaran
1. Penempatan personil
 2. Sumber air
 3. Operasi pemadaman

Bagian Alir Tahapan Operasi Pemadaman Kebakaran



Sumber : Data Dinas Pemadam Kebakaran Kab.Bandung Barat

Adapun yang menjadi Faktor penghambat dan permasalahan utama dalam proses pelayanan penanganan kebakaran di Kabupaten Bandung Barat adalah sebagai berikut :

- 1) Infrastruktur Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bandung Barat yang sangat minim.
 - a. Jumlah ketersediaan sarana yang berstandar pelayanan minimum (SPM) yang sangat kurang
 - Armada operasional yang sedikit
 - Minimnya peralatan APD dan peralatan serta perlengkapan pemadam kebakaran
 - Terbatasnya proses investigasi
 - b. Kekurangan ketersediaan prasarana yang cukup serta sesuai dengan standar pelayanan minimum (SPM).
 - Pemerataan sektor dan pos sektor yang ada di Kabupaten Bandung Barat masih kurang
 - Markas komando dinas kebakaran masih perlu banyak perbaikan
 - Pemadam kebakaran belum memiliki tempat workshop
 - Terbatasnya program diklat bagi aparatur pemadam kebakaran
 - Dinas pemadam kebakaran tidak memiliki alat pengujian dan laboratorium
- 2) Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bandung Barat belum mencapai target dari tingkat

waktu tanggap (respon time rate) 15 menit jumlah waktu yang dipakai untuk proses transportasi ke lokasi kejadian berdasarkan Permendagri Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa Pelayanan proses penyelamatan dan evakuasi kebakaran merupakan tuntutan kegiatan yang dilaksanakan dengan cepat dan tepat serta sesuai dengan tingkat waktu tanggap (respon time rate). Respon time rate adalah waktu yang dihitung mulai dari saat menerima laporan dan informasi, perjalanan sampai tiba ditempat sampai pada tindakan yang dilakukan sebagai proses penyelamatan. 5 menit persiapan pasukan, 5 menit perjalanan dan 5 menit pelaksanaan penyelamatan jadi jumlah seluruh waktunya adalah 15 menit. Beberapa masalah yang ada pada aspek respon time rate :

- a. Masih kurangnya sarana prasarana yang tersedia dan belum memenuhi standar pelayanan minimum
- b. Akses jalan yang ada untuk menuju lokasi kebakaran sangat tidak layak dan menghambat. Kabupaten Bandung Barat, saat ini mengalami pertumbuhan yang sangat cepat dan pesat. Begitu juga dengan pertumbuhan penduduknya yang diiringi dengan pertumbuhan jumlah kawasan perumahan baru yang dibangun dengan tingkat kemacetan tinggi di arus lalu lintas pada jam tertentu apalagi pada saat jam berangkat dan pulang kantor, arus lalu lintas akan mengalami kemacetan yang diakibatkan oleh semakin banyaknya kendaraan bermotor baik itu roda dua maupun roda empat. Sampai dengan tahun 2020 Ada 3 perhitungan klasifikasi jalan yang ada di kabupaten Bandung Barat, yaitu jenis jalan yang lancar beraspal dengan panjang 114 km (2015), jenis jalan buruk Kerikil dengan panjang 39 km (2015) dan jalan basah Tanah sepanjang 2 km (2015). Jadi pada tahun 2015 berdasarkan perhitungan BPS kabupaten Bandung Barat, jumlah panjang jalan mencapai 155 km. Berdasarkan kondisinya di lapangan jenis jalan (2015) dengan kategori kondisi baik 213.67, kategori sedang 127.66, kategori rusak 169.70 dan kategori rusak berat mencapai 42.62. Dengan rasio kemacetan lalu lintas dan kondisi jalan dapat mempengaruhi pelaksanaan response time yang dilaksanakan. Terlebih lagi dengan cukup besarnya ukuran unit dari mobil pemadam kebakaran yang akan dikerahkan. Adapun penghambat *respon time rate* adalah :
 - Pembukaan portal
 - Jumlah polisi tidur
 - Luas area parkir
 - Karakteristik jalan yang sempit atau lebar
 - Area perlintasan kereta api dengan frekuensi tinggi
- c. Kurangnya keakurasian pada saat pelaporan kejadian pemadaman kebakaran. Salah satu aspek utama pada *respon time rate* adalah pada pelaporan kejadian, faktor utamanya antara lain :
 - Ketepatan isi dalam berita acara kejadian kebakaran
 - Tingkat akurasi titik lokasi kebakaran

Sarana penerimaan laporan kebakaran yang dimiliki oleh Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bandung Barat yakni via telepon. Seringkali terjadi berita yang disampaikan oleh warga merupakan berita kejadian yang palsu/hoax. Hal ini tentunya sangat merugikan pihak Dinas Pemadam Kebakaran. Selain dari itu, dalam menentukan lokasi kejadian kebakaran Dinas

Pemadam Kebakaran juga membutuhkan petunjuk lokasi dan alamat yang sangat akurat. Hal ini sangat berguna untuk pemadam kebakaran menentukan jalur terpendek dan tercepat yang bisa ditempuh oleh personil dengan menghindari titik kemacetan yang ada. Idealnya Personil kebakaran membutuhkan suatu sistem yang dapat digunakan oleh warga dalam melaporkan semua kejadian kebakaran dengan tingkat validasi yang tepat. Pengukuran validasi dapat berupa:

- Nomor telephone
- Foto kejadian kebakaran
- Mentracking GPS pada titik lokasi kebakaran

Output yang keluar pada sistem di Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bandung Barat akan lebih akurat jika dilengkapi dengan tampilan peta lokasi. Dengan demikian, dapat menjadikan petunjuk bagi pos sektor terdekat dengan lokasi kejadian kebakaran. Belum adanya badan pengawasan dan pengendalian badi Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bandung Barat. Ada beberapa masalah yang harus dihadapi menyangkut dengan tidak adanya pengawasan dan pengendalian Dinas Pemadam Kebakaran :

- a. Tidak adanya regulasi yang kuat untuk Dinas Pemadam Kebakaran
 - Tidak adanya Regulasi Pengawasan dan Pengendalian yang Kuat
 - Tidak adanya Regulasi terkait dengan pencegahan kebakaran
- b. Masih kurangnya kompetensi aparatur internal
 - Kompetensi pengujian
 - Kompetensi evakuasi
- c. Sarana prasarana dan wasdal yang kurang memadai
 - Laboratorium dan alat pengujian
 - Sumber/pasokan air untuk armada pemadam
- d. Kurangnya campur tangan dan keterlibatan masyarakat
 - Tidak optimalnya BALAKAR/SATLAKAR
 - Program sosialisasi yang tidak berjalan

3.3. Adaptasi

Adaptasi memiliki definisi suatu tahapan atau proses yang dilakukan dengan menyesuaikan diri dalam menyelaraskan suatu individu terhadap perubahan – perubahan yang terjadi di lingkungannya. Adaptasi terdiri dari beberapa faktor, yaitu : (1) peningkatan kemampuan (2) sarana prasarana. Perubahan ditujukan sebagai perbaikan adalah kunci dari sebuah langkah maju suatu organisasi maka dalam rangka peningkatan kualitas kerja Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bandung Barat merencanakan beberapa perbaikan yaitu :

- Penetapan beberapa program yang dilaksanakan guna mencapai target dan tujuan penanggulangan kebakaran
- Menyusun prosedur yang memuat penanggulangan bencana
- Menentukan syarat pengawasan dan melaksanakan sistem dokumentasi
- Melaksanakan penyusunan anggaran untuk melaksanakan program yang telah di rancang

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Bencana kebakaran bisa terjadi kapan saja dan dimana saja, jika dilihat dari komposisi

penggunaan lahannya, di Kabupaten Bandung Barat bencana kebakaran ini rawan terjadi di hutan, lahan pertanian, gedung industri, fasilitas publik seperti pasar maupun pemukiman warga. Maka dari itu pengamanan dan proteksi terhadap kebakaran merupakan salah satu aspek penting yang harus diperhatikan dalam proses pembangunan rumah, gedung, bangunan ataupun lahan lainnya. Selain pencegahan, sebelum terjadinya kebakaran yang juga harus kita perhatikan adalah penanganan yang terjadi bila kebakaran terjadi secara tiba – tiba. Hal ini juga tak kalah pentingnya, karena bencana kebakaran juga bisa terjadi meskipun kita sebelumnya sudah memproteksi secara maksimal. Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya kebakaran baik itu kebakaran lahan maupun kebakaran gedung bangunan yaitu, faktor alam termasuk petir, kemarau berkepanjangan yang menyebabkan kekeringan dan letusan gunung vulkanik serta faktor manusia yaitu, pembukaan lahan, korsleting listrik, penggunaan bahan berbahaya yang mudah terbakar dan rokok yang dibuang sembarangan ataupun situasi human eror lainnya. Urusan pencegahan dan penanganan bencana kebakaran ini sudah menjadi tugas pemerintah yang di amanatkan kepada dinas dan petugas pemadam kebakaran untuk menanganinya. Tujuan di bentuknya Dinas Pemadam Kebakaran yaitu sebagai jawaban keresahan masyarakat mengenai masa yang akan datang dengan misi akan bersungguh – sungguh menyediakan suatu pelayanan penuh bagi masyarakatnya, terkhusus pada bidang layanan pencegahan dan penanganan kebakaran. Salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja pelayanan pemadam kebakaran Kabupaten Bandung Barat selain kekurangan personil, sarana prasarana dan faktor lainnya. Terutama yang menjadi perhatian adalah luasnya cakupan wilayah di Kabupaten Bandung Barat. Oleh karena itu, agar pelayanannya bisa tersampaikan pada seluruh wilayah, pemerintah membuat sebuah pos pemadam dengan cara membagi – bagi wilayah perkotaan atau daerah dengan di dasarkan pada karakteristik besarnya kebutuhan pasokan air untuk memadamkan sebuah api yang disebut wilayah manajemen kebakaran (WMK). Wilayah manajemen kebakaran ini juga bertujuan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dengan cara mendistribusikan pusat layanan agar bisa tersebar dengan lebih merata dan dalam cakupan wilayah yang paling terdekat.

IV. KESIMPULAN

Dapat disimpulkan bahwa tingkat efektivitas pelayanan penanganan kebakaran berdasarkan pembagian manajemen wilayah di Kabupaten Bandung Barat berdasarkan penelitian yang saya lakukan dan analisis data dengan menggunakan teori Duncan pelayanan penanganan kebakaran di Kabupaten Bandung Barat termasuk kedalam kriteria kurang efektif, maka dari itu diperlukan upaya yang serius untuk memajukan dan meningkatkan kualitas keefektifan pelayanan penanganan kebakaran yang dilaksanakan oleh Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bandung Barat. Menurut peneliti pribadi ada beberapa saran yang mungkin bisa menjadi masukan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat untuk kedepannya.

- 1) Diperlukan penambahan pos pemadam atau pos sektor pelayanan daerah. Pada saat ini pemadam kebakaran Kabupaten Bandung Barat baru memiliki 4 pos pemadam diantaranya Padalarang, Lembang, Cikalong Wetan dan Cililin. Jika dilihat dari kondisi sarana dan prasarana masih jauh dari layak dan memenuhi Standar Pencapaian Minimum berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2019. Maka dari itu perlu ada penambahan pos wilayah pelayanan daerah terutama pada saat ini yang diutamakan adalah di daerah Cipatat, Batujajar, Sindang kerta, Gunung Halu dan Cisarua karena daerah – daerah ini termasuk kepada daerah yang memiliki intensitas kebakaran dan bencana yang dikategorikan cukup tinggi, serta banyak juga masukan dan desakan permintaan dari masyarakat untuk menambah pos di wilayah tersebut. Jika daerah tersebut memiliki posnya tersendiri maka

respon time rate akan bisa terpenuhi karna mengacu pada waktu yang kita miliki hanya 15 menit setelah menerima laporan kejadian dengan ketetapan jarak tempuh 7,5 KM dari pos terdekat.

- 2) Penambahan dan peningkatan kompetensi personil, untuk memenuhi standar pencapaian minimum Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bandung Barat berdasarkan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2019 bahwa setiap 5000 jiwa masyarakat akan dilayani oleh satu orang aparaturnya pemadam kebakaran. Pada saat ini jumlah masyarakat di Kabupaten Bandung Barat adalah 1.667.724 jiwa maka diperlukan minimal 333 orang aparaturnya pemadam kebakaran. Realitanya pada saat ini Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bandung Barat hanya memiliki 97 orang personil dan masih kekurangan 236 orang untuk memenuhi standar dan di sebar tanggungjawabnya sebagai tenaga penyuluh, tenaga inspeksi, kesekertariat, rescue dan personil pemadaman.
- 3) Penambahan sarana prasarana, untuk penambahan pada sarana dan prasarana pada Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bandung Barat dapat di simpulkan pada tabel di bawah ini :

Perhitungan kekurangan Sarana Prasarana

Mobil Damkar				Jumlah Pos	Jumlah Pompa Portable Kebakaran	Jumlah Alat Pelindung Diri	Ket
Pemancar Air	Rescue	Tangga	Tangki air				
12	4	1	16	16	16	270	

Sumber : Data Dinas Pemadam Kebakaran Kab.Bandung Barat

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu penelitian dan jarak dan akses dari markas komando ke pos sektor wilayah.

Arah Masa Depan Penelitian (future work). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan pelayanan penanganan kebakaran di Kabupaten Bandung Barat untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bandung Barat beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Delli Noviarti Rachman. Analisis Sistem Proteksi Kebakaran Di Kawasan Padat Penduduk (Studi Kasus Pada Kelurahan Ketapati Palembang). Universitas Tamansiswa Palembang.
- Imam A.Sadisun. 2004. Manajemen Bencana: Strategi Hidup di Wilayah Berpotensi Bencana. Institut Teknologi Bandung.
- Mira Veranita & Dedeng Yusuf Maolani. 2018. Analisis Kualitas Pelayanan Publik Pada Dinas Pencegahan Dan Penanggulangan Kebakaran Kota Bandung. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Rika Trisna. 2003. Kajian Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran Di Kota Palembang.

- Universitas Diponegoro Semarang.
- Zulkarnain, 2012. Pengaruh Kinerja Pegawai Terhadap Efektivitas Organisasi di Kantor Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- Arikunto Suharsimi, 2010, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta.
- BPSI Safety Solution Expert, *Ahli K3 Spesialis Penanggulangan Kebakaran Tingkat A*, PT. Building And Plant Safety Institute.
- BPSI Safety Solution Expert, *Koordinator Unit Penanggulangan Kebakaran Tingkat B*, PT. Building And Plant Safety Institute.
- BPSI Safety Solution Expert, *Peran Petugas Kebakaran Tingkat D*, PT. Building And Plant Safety Institute.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No.114 Tahun 2018 Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Dasar Pelayanan Minimal sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota.

